

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 09
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK
WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DALAM
RANGKA PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI
DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN (DISPORAPARBUD) SERDANG
BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD KHUSAIRI

NPM : 1403100118

Program Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

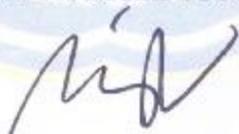
Nama : MUHAMMAD KHUSAIRI
NPM : 1403100118
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DALAM RANGKA PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI DI DINAS PARIWISATA SERDANG BEDAGAI

Medan, 16 MARET 2018

PEMBIMBING


Dr. LEYLA KHAIRANI, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

Pt. DEKAN




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD KHUSAIRI
NPM : 1403100118
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D

PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : Dr. LEYLA KHAIRANI, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. RUDIANTO, M.Si

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **MUHAMMAD KHUSAIRI**, NPM : 1403100118 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

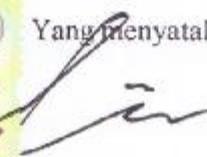
Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



Yang menyatakan,


MUHAMMAD KHUSAIRI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Muhammad Khuseiri
P M : 1403100118
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Serdang bedagai no 9 tahun 2008-2009 tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai dan Sungai dalam rangka pengelolaan objek wisata bahari di distrik Perbud.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	24 Januari 2018	Acc Draft mawen care	
2	21 Februari 2018	* Perbaiki latar belakang masalah. * Perbaiki penulisan	
3	22 Februari 2018	* Perbaiki latar belakang masalah. * Perbaiki bab 2 * Perbaiki penulisan	
4	1 Maret 2018	* Perbaiki bab 3	
5	2 Maret 2018	* Perbaiki bab 3 dan bab 4	
6	5 Maret 2018	* Perbaiki bab 4.	
7	7 Maret 2018	* Perbaiki Abstrak * Perbaiki kesimpulan.	
8	12 Maret 2018	* Perbaiki penulisan * Acc skripsi	

Medan, 16 Maret 2018.

Dekan,

Dr. Rudianto, M.Si

Ketua Program Studi,

Naila Khairiah S.P.M.Pd

Pembimbing ke :

Dr. Leylia Khairani, M.G.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DALAM RANGKA PENGELOLAAN OBJEK WISATA BAHARI DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD KHUSAIRI
1403100118

Industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasilan devisa yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pengadaan lapangan kerja. Secara ekonomi pariwisata memang memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan incom perkapita dan penigkatan devisa negara. Dalam kehidupan sosial terjadi intraksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam *way of life* masyarakat serta terjadinya integritas sosial.

Pengelolaan objek wisata bertujuan unutm mewujudkan sapta pesona, membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan objek wisata merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membuat keputusan – keputusan dalam pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pasir dan lautan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode deskripsi dengan analisis dan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata bPesisir Pantai Dan Sungai belum terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci: *Pengelolaan Objek Wisata Bahari*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai Dalam Rangka Pengelolaan Objek Wisata Bahari Di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda Zulamri serta Ibunda tercinta Salbiyah yang telah memberikan kasih sayangnya berupa bimbingan, semangat serta doa yang tak berhenti mengiringi langkah penulis. Terimakasih atas pendidikan hidup dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta
5. Ibu selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingannya kepada penulis.
6. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Adik penulis Muhammad Riski, Putri Angraini yang selalu setia memberi semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat yang penulis sayangi yaitu Ahmad derajad, Arief Adillah, Rofik, Putra, Alfin, fikri, Reki Fandi, Fajar, Adi Wijaya, Nelly, Putri, Pitri, Rima, Retno, ulfa yang tak kenal lelah, yang telah banyak menemani dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan IAN A SORE dan IAN D Kebijakan Publik, khususnya Muhammad Arief Adillah, Ahmad Derajad Ritonga, Reki Fandi dan Nesya Kharisma yang selalu memberikan semangat selama menyusun skripsi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar– besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan

rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

MUHAMMAD KHUSAIRI

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Kebijakan	10
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
C. Karakteristik Kebijakan.....	13
D. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Kebijakan	14
E. Unsur – unsur Kebijakan Publik	15
F. Pengertian Implementasi	16
G. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	18

H. Faktor – faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	19
I. Pendekatan Implementasi Kebijakan	21
J. Pengertian Pengelolaan	22
K. Pengertian Objek Wisata	23
L. Pengertian Pesisir Pantai	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Kerangka Konsep	29
C. Definisi Konsep	30
D. Katagorisasi	31
E. Narasumber	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: KERANGKAKONSEP	29
Gambar 3.4: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DINAS DISPORAPARBUD	42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 : REKAP JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2016.....	37
Tabel 3.3 : REKAP JUMLAH PENGUNJUNG TAHUN 2017.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pariwisata dalam negeri terus dikembangkan dan diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan disamping untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Usaha pembinaan dan pengembangan pariwisata dalam negeri ditujukan pula untuk meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa, memperkenalkan peninggalan sejarah serta keindahan alam termasuk alam bahari diseluruh pelosok tanah air.

Industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasilan devisa yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang pengadaan lapangan kerja. Istilah pariwisata populer tahun 1958 setelah diselenggarakannya musyawarah Nasional Tourims II. Namun secara resmi istilah pariwisata dikenal secara luas setelah pengertian kata "Tourims" menjadi kata pariwisata yang diresmikan oleh presiden Soekarno pada tahun 1960. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan istilah Dewan Tourims Indonesia menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI) .

Pengelolaan objek wisata bertujuan untuk mewujudkan motto pariwisata SAPTA PESONA, membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Mulai tahun-tahun terakhir inilah proyek-proyek pembangunan hotel-

hotel dan restoran pariwisata bertaraf internasional banyak dibangun. Adanya kemajuan fisik ini merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan. Tetapi kemajuan – kemajuan tersebut tidak dibarengin dengan mental spiritual akan mengakibatkan kesengsaraan. Pengembangan suatu pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Secara ekonomi pariwisata memang memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan incom per kapita dan peningkattan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam *way of life* masyarakat serta terjadinya integrasi sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam rangka pengelolaan objek wisata pesisir pantai, perlu dilakukan perosedur dan pengawasan. Selain itu pengelolaan objek wisata merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya moto pariwisata yaitu SAPTA PESONA. Sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ditempat-tempat wisata bahari.

Pengelolaan objek wisata merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membuat keputusan – keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Tetapi pengeolaan bangunan di sepanjang sempadan pantai masih terlihat tidak terkelola

karna masih banyaknya bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan pantai padahal itu sangat beresiko buruk bagi pengunjung yang berada dibangunan tersebut, apabila air laut pasang ombak yang datang sangat besar sehingga lama kelamaan mampu membuat bangunan yang berdiri disempadan pantai rusak dan roboh, pasir pantai yang di bawak oleh ombakpun sering masuk kedalam bangunan tersebut.

Padahal di dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai sudah tertuang jelas peraturan yang melarang untuk mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang sempadan pantai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendah air laut, didalam peraturan tersebut juga sudah jelas di larang membuka usaha atau bejualan di sepanjang sempadan pantai sepanjang 15 m dari titik pasang tertinggi dan terendh air laut tetapi masih banyak juga bangunan permanen yang berdiri disempadan pantai bahkan ada bangunan yang berdiri diatas air laut padahal sudah jelas peraturan yang dibuat dan sudah ada juga denda yang ditetapkan jika ada yang melanggar peraturan untuk mendirikan bangunan di sepanjang sempadan pantai. Oleh karna itu pemerintah atau dinas yang terkait diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan objek wisata pesisir pantai dengan baik karna setiap tahun wisatawan yang mengunjungin wisata bahari seperti Pantai Bali Lestari meningkat setiap tahunnya.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan

masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui pembangunan dan pendayagunaan berbagi potensi kepariwisataan nasional.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Dinas pariwisata serdang bedagai bahwa pengelolaan objek wisata pesisir pantai diharapkan mampu menjadi lebih baik, yaitu dengan adanya pengawasan dan prosedur yang mengawasi pengelolaan tersebut agar perkembangan objek wisata di Serdang Bedagai dapat menjadi andalan Kabupaten untuk menambah PAD Serdang Bedagai.

Dalam hal pengelolaan pariwisata kita harus mempergunakan retribusi masuk dari para wisatawan yang datang, untuk menambah penghasilan PAD Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk memperhatikan kondisi dan sarana prasarana pantai yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pengelolaan pariwisata kita harus memperhatikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari segi fasilitas – fasilitas yang ada disekitar pantai, karena hal tersebut dapat mempengaruhi banyak tidaknya pariwisata yang akan masuk ke pantai. Jika fasilitas yang ada disekitar pantai atau jalan menuju pantai memadai, itu akan menjadi kekuatan dan peluang pantai tersebut banyak didatangi oleh pariwisata baik wisata nusantara maupun wisatawan mancanegara, tetapi apabila fasilitas pendukung yang ada di sekitar pantai atau menuju pantai kurang memadai itu akan menjadi sebuah ancaman atau kelemahan pantai untuk tidak banyak dikunjungi oleh para wisata.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai bahwa yang di maksud Pengelolaan Objek Wisata Bahari adalah dilarang membangun atau mendirikan segala jenis bangunan permanen disepanjang sempadan pantai, dilarang membuka usaha atau berjualan disepanjang sempadan pantai, dilarang mengambil atau memindahkan atau mengurangi tanah maupun pasir, serta segala sesuatu yang dapat mengubah atau merusak kondisi pinggir pantai. Tetapi dalam kenyataan dinas pariwisata kurang mengawasi pengelolaan objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan objek wisata bahari dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai belum sepenuhnya terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008, sehingga perlu dilakukan lagi pengawasan terhadap pengelolaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NO 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DALAM RANGKA PENGLOLAAN OBJEK WISATA BAHARI DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KE BUDAYAAN (DISPORAPARBUD) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini hanya akan membatasi permasalahan pada pengelolaan objek wisata bahari di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dan Pantai Bali Lestari Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Perumusan Masalah

Sugiyono (2010:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian harus di dasarkan pada masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Dalam Rangka Penglolaan Objek Wisata Bahari di Disporaparbud Serdang Bedagai?
2. Bagaimana prosedur dalam mendukung pelaksanaa pengelolaan objek wisata bahari di Serdang Bedagai?
3. Bagaimana dukungan masyarakat dalam mengelola wisata bahari di Serdang Bedagai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya perumusan masalah. Oleh karena itu Sugiyono (2010:209) menjelaskan bahwa tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai dan Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Untuk mengetahui pentingnya prosedur dalam menunjang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dalam rangka pengelolaan objek wisata bahari.
- c. Untuk mengetahui apakah Disporaparbud dan masyarakat mampu mengelola objek wisata bahari yang ada di Serdang Bedagai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul dilingkungannya.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada pemerintah khususnya dalam meningkatkan pengelolaan objek wisata bahari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008.
- c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, serta bahan bandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan satu bab dan bab lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terkait dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Unsur – unsur Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Karakteristik kebijakan, Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Kebijakan Publik, Faktor – faktor Pendukung Implementasi Kebijakan, Pendekatan Implementasi Kebijakan, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Objek Wisata, Pengertian Pesisir Pantai

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari : Metode Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data,
Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Katagorisasi

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari: Penyajian Data, Analisis Data

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEROTIS

Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang akan diteliti dari suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat, gejala – gejala yang timbul dimasyarakat itu lah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang harus segera diberi penyelesaian. Penyelesaian haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan hal tersebut diatas dan didasarkan pada objek penelitian yang akan diteliti maka penelitian menyimpulkan bahwa kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Woll (dalam Tanklisan 2003:2) kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Friedrich (2007:20) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan dan mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Knoepfel (2009:21) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi dan struktur dan berulang di antar berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun

privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis di definisikan sebagai masalah publik.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dan memiliki kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Friedrich (1969) dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi,

dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah sehingga salah satu ciri kebijakan “*whatever government choose to do or not to do*” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Dye dalam Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang di putuskan oleh pemerintah, di samping itu konsep ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Dimana suatu tindakan yang sebenarnya di luar dominan kebijakan publik.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik itu dalam perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.

- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidak akan efektif.

3. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2008:24) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat pemerintah mempunyai beberapa karakteristik kebijakan publik yaitu:

- a. Mempunyai tujuan tertentu
- b. Basis tindakan pola tindakan pejabat pemerintah
- c. Merupakan apa yang benar dilakukan oleh pemerintah bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan dilaksanakan
- d. Bersikap positif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e. Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (legalitas) dan bersifat memaksa.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Keputusan Kebijakan

Menurut Islamy (2003:25) beberapa factor yang mempengaruhi kebijakan antara lain:

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata tapi proses dan prosedur pembuatan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata.

b. Adanya faktor kebiasaan lama (konservatisme)

Kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu seringkali digunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu dikuati kebiasaan administrator.

c. Adanya pengaruh sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan.

e. Adanya pengaruh masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuat keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan bagian wewenangnya pada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

5. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

- a. Tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karna adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan.
- b. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagai masalah yang tidak benar.
- c. Tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses permusuhan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa sarana ini antara lain, kekuasaan, isentif.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Dibuat satu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti.

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan-badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di capai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:147) implementasi adalah pandangan secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program..

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik pada individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis,

sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Agustino (2010:39) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Randaal dan Grace (dalam Winarno 2012:148) implementasi mencakup tindakan oleh beberapa actor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan:

- a. Badan-badan pelaksana yang di tegasi oleh undang-undang tanggung jawab program harus mendapatkan sumber-sumber yang membutuhkan agar implementasinya berjalan lancar, sumber-sumber meliputi personil peralatan, bahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang.
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program.
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
- d. Dan terakhir yaitu badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan pada pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan tentang kegiatan lainnya yang bisa di pandang sebagai wujud dan keluaran dan nyata dari suatu program.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut prof. H. Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Winarno (2012:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk menyediakan sarana); *to gove pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah ketetapan telah ditetapkan dan di setujui.

3. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau 4 (empat) faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik diantaranya:

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:96) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

B. Sumber daya.

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang efektif maka implementasi kebijakan publik tersebut tidak akan efektif.

Adapun yang mempengaruhi sumber daya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1) Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia berhubung dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia.

a. Anggaran

Anggaran berhubungan dengan ketersediaan modal dalam pencapaian suatu kebijakan.

b. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program kebijakan.

c. Informasi dan kewenangan

Informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sedangkan kewenangan berperan dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

C. Perilaku

Sikap maupun karakteristik dari pelaksanaan kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun tidak jika sebaliknya.

D. Struktur organisasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yang mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator agar bertindak pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

9. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (1986:71) mendasari beberapa tipe pendekatan implementasi kebijakan yaitu:

a. Distributive

Hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat

b. Competitive

Hal ini mengarah pada persaingan dimana suatu keputusan yang diambil harus pada yang terbaik agar pelaksanaannya pun berjalan dengan baik

c. Regulatory

Mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang nampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tipe ini juga dikembangkan menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa

alasan tidak dapat diterima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan pembatasan

d. **Redistributive**

Melibatkan sebuah sadar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak dan beberapa nilai lain dikalangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat luas.

C. Konsep Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Laiper (1990:256), pengelolaan merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi – fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Menurut Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan, pengelolaan biasa diartikan yaitu manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi atau dan

penggunaan – penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Sowearno (2002:378) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.

D. Konsep Objek Wisata

a. Pengertian Objek Wisata

Menurut Marpaung (2002:78) objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan objek dan daya tarik wisata, mengelola dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

b. Jenis Objek Wisata

1. Wisata alam yaitu kegiatan perjalanan wisata yang mengunjungi daya tarik wisata dari alam
2. Wisata budaya yaitu kegiatan wisata yang mengunjungi dengan mengetahui kebudayaan. Adat istiadat, seni pertunjukan dan ritual

3. Wisata sejarah yaitu kegiatan wisata yang mengunjungi tempat – tempat bersejarah yang terbentuk dari jalan dulu
4. Wisata religi yaitu kegiatan wisata yang mengunjungi makam – makam raja – raja atau sultan/pangeran dari suatu daerah
5. Wisata kuliner yaitu kegiatan wisata makan - makan dan mengetahui makanan khas dari masing – masing daerah yang di kunjungi
6. Wisata minat khusus yaitu kegiatan wisata seperti melihat kerajinan tangan, agro wisata dan arsitektur unik dari suatu daerah atau tujuan wisata
7. Wisata belanja yaitu kegiatan wisata belanja dengan yang menjadi cirri khas dan keunikan dari daerah tujuan wisata atau daerah yang dikunjungi

c. Unsur-unsur Industri Wisata

1. Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara,dapat berupa hotel,losmen,guest house,pondok,cottageiin,perkemahan dll
2. Jasa boga dan restoran adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman,yang dikelola secara komersial
3. Transportasi dan jasa angkut adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang akutan. Tranportasi dapat dilakukan melalui darat,laut dan udara

4. Tempat penukaran uang tempat penukaran mata uang asing(money changer) kini telah berkembang dengan pesat, penukaran uang tidak hanya dilakukan di bank, melainkan juga pada perusahaan-perusahaan money changer yang tersebar ditempat-tempat strategis, terutama dikota-koa besar
5. Atraksi wisata dapat berupa tari,music,upacara adat dll sesuai dengan budaya setempat. Pertunjukan ini dapat dilaksanakan secara tradisional maupun modern, melalui atraksi wisata ini dapat dilakukan salah satunya mengangkat keunggulan local setempat
6. Cendera mata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat oleh wisatawan pada saat kembali ketempat asalnya. Cendera mata ini biasanya berupa benda-benda kerajinan tangan memberikan suatu keindahan seni dan sifatnya khas untuk tiap daerah
7. Biro perjalanan adalah suatu badan usaha dimana oprasionalnya meliputi pelayanan semuaberangkat hingga kembali,sehingga mereka merasa nyaman selama perjalanan

E. Konsepsi Pesisir Pantai

a. Pengertian Pesisir Pantai

Menurut fabianto (2014) pesisir pantai adalah pertemuan antara ekosistem darat,ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.

Menurut Kay Dan Alder (1999) menyatakan bahwa pesisir pantai merupakan wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat tempat bertemunya daratan dan lautan.

b. Jenis-jenis Pantai

1. Pantai landai yaitu pantai yang permukaannya relative datar
2. Pantai curam yaitu pantai yang biasanya bergunung-gunung. Karena peretakannya yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing yang curam dan laut dalam
3. Pantai karang yaitu pantai yang terjadi jika didasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu mengetahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga dapat memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis dan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Demikianlah menurut moleong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen

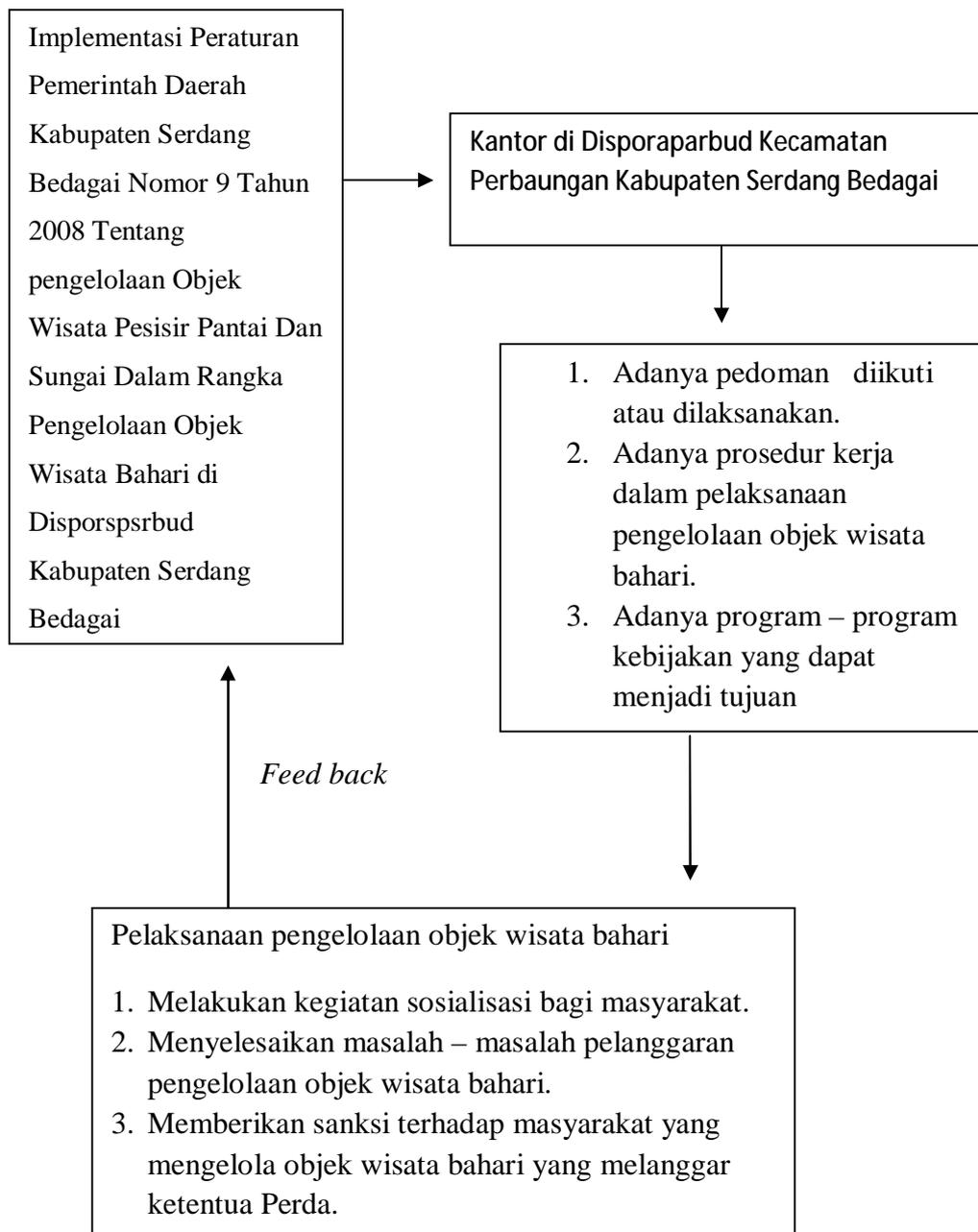
- a) Mengumpulkan informasi actual secara rinci dengan melihat gejala dan permasalahan yang ada.
- b) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek yang berlaku.
- c) Membuat perbandingan atau evaluasi.

- d) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

B. Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (1995:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama berdasarkan persepsi yang dimiliki

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, abstrak, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penulisan ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a) Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
- b) Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
- c) Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku di dalam masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundang-undangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat.
- d) Implementasi kebijakan publik adalah tindakan – tindakan yang di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan sebelumnya.

- e) Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.
- f) Objek wisata adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu.
- g) Peraturan Daerah adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan – kehidupan di Kabupaten Serdang Bedagai

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut :

- a. Adanya penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Di Dinas pariwisata serdang bedagai
- b. Adanya perilaku sikap bertanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan wisata bahari
- c. Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata.

E. Narasumber

Ada pun narasumber dalam penelitian sebanyak 4 orang, terdiri atas:

a) 2 (dua) orang dari kantor DISPORAPARBUD

Ø Bapak Sampe Lumbantoruan, S.Pd selaku Kepala Bidang Pariwisata

Ø Bapak Ikhwan Hasian Siregar, S Sos selaku Pj Kasih Destinasi dan Industri Pariwisata

b) 2 (dua) orang masyarakat sekaligus yang mengelola langsung objek wisata bahri di kabupaten Serdang Bedagai

Ø Bapak Apriyansyah Putra (Pengelola Objek Wisata)

Ø Bapak Alfian Nugraha (Pengelola Objek Wisata)

Gambaran diatas menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Disporaparbud dalam melaksanakan Peraturan Daerah di dalam Pengelolaan objek wisata bahari dimana hasiln penelitian ini akan dideskripsikan atau dijelaskan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a) Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian (field research) atau obyek yang diteliti atau data yang diperoleh. Dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber yang

kompeten. Sebagai narasumber dalam hal ini adalah Kabid Bidang Pariwisata, Pj Kasi Destinasi dan Industri Pariwisata, dan beberapa masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari yang ada di Serdang Bedagai.

b) Data sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku referensi serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan batuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil di kumpulkan oleh penelitian melalui perangkat metodologi tertentu.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapang, dokumentasi gambar, dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang di ajukan.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai dan Pantai Bali Lestari di Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dilakukan bulan Januari sampai awal Maret.

1. Visi dan Misi Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Serdang Bedagai

Adapun visi dan misi kantor Disporaparbud adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi kantor Disporaparbud adalah Mewujudkan pemuda yang unggul untuk menunjang pariwisata kreatif yang berbudaya

b. Misi

Yang menjadi misi dari kantor Disporaparbud adalah :

- 1) Mengembangkan industri pariwisata yang kreatif
- 2) Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian
- 3) Mengembangkan potensi kepemudaan yang kreatif dan inovatif

4) Meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan olahraga

2. Jumlah Objek Wisata Bahari Yang Ada Di Kabupaten Serdang Bedagai

Ada 14 Pilihan Objek Wisata Bahari di 4 Kecamatan antara lain :

a. Kecamatan Pantai Cermin

- Ø Pantai Mutiara 88
- Ø Pantai Wong Rame
- Ø Pantai Cermin Theme Park dan Ressor Hotel
- Ø Pantai Sri Mersing
- Ø Pantai Bali Lestari
- Ø Pantai Kuala Putri
- Ø Pantai Pondok Permai

b. Kecamatan Perbaungan

- Ø Pantai Kelang Indah
- Ø Pantai Cemara Kembar
- Ø Pantai Nipah/Atp
- Ø Hutam Mangrove Muara Baimbai
- Ø Pantai Romantis

c. Kecamatan Teluk Mengkudu

- Ø Pantai Sialang Buah

d. Kecamatan Tanjung Beringin

- Ø Pulau Berhala Sedang Bedagai

3. Rekap jumlah Pengunjung Per Bulan Per Objek Wisata Bahari Periode 1 Januari S/D 30 Desember 2016 Samapai Periode 1 Januari S/D 29 Desember 2017

Hasil rekap jumlah pengunjung yang didapat di Disporaparbud dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekap Pengunjung Periode Januari s/d 30 Desember 2016

No	Retribusi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Them park	-	-	5000	-	15000	6800	12000	6,000	-	2500	4000	5500	468000
2	Pondok permai	-	16,666	5000	5000	5000	-	11666	5000	3333	3333	4500	13500	73000
3	Bali lestari indah	29500	20000	20000	12200	22000	-	30000	15000	5000	-	11000	3000	167700
4	Woong rame	3464	1745	1142	1970	2030	200	9542	1840	1550	997	727	1673	25980
5	Klang indah	2267	431	370	330	960	215	5310	675	600	188	152	243	11726
6	Sialang buah	2530	710	460	460	990	100	3650	1220	880	520	430	720	12670
7	Kuala putri	1045	575	300	210	460	50	1150	430	330	230	160	340	5280
8	Sri mersing	2200	1000	570	1050	880	83	2660	773	760	575	400	1000	11951
9	Mutiara 88	525	395	255	170	325	30	680	30	60	35	15	35	2555
10	Nipah indah	1950	1137	750	500	1050	100	3300	1100	1100	890	460	700	13037
11	Romantis	-	300	133	67	300	50	900	665	385	280	240	593	3913
12	Mangrove	200	1500	-	2000	1000	-	3000	-	300	1000	700	1000	12500
Jumlah Pengunjung		45466	44459	33980	23057	49995	7628	83858	33033	13998	10548	22784	28304	397112

Tabel 3.2
Rekap Pengunjung Periode Januari s/d 29 Desember 2017

No	Retribusi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Them park	10132	10093	1585	1573	5045	5044	10045	5052	5025	5075	5020	5083	68772
2	Pondok permai	9000	4000	10567	5123	10000	12432	4235	19863	5018	5081	5011	5123	95453
3	Bali lestari indah	28967	14500	16726	27711	41473	49900	3901	14565	13550	13882	8815	21567	255557
4	Woong rame	5220	1000	1431	1145	1272	9163	1019	1322	2181	1295	1288	1189	27525
5	Klang indah	2613	120	517	637	599	4631	499	348	663	180	129	163	11099
6	Sialang buah	3130	500	845	761	977	5213	1142	371	482	324	182	207	14134
7	Kuala putri	960	190	366	353	432	1200	260	335	241	160	165	302	4964
8	Sri mersing	3900	550	2060	2053	1956	2721	664	448	505	373	354	679	16263
9	Mutiara 88	-	-	-	-	-	850	170	150	211	115	61	137	1689
10	Nipah indah	4263	650	1826	1032	1388	3693	1107	448	810	780	428	763	17190
11	Romantis	2687	900	1114	995	21203	3124	713	475	451	502	307	142	32613
12	Mangrove	3000	1000	1381	457	1000	2310	770	525	535	514	871	521	12884
Jumlah Pengunjung		79092	34503	38266	36289	81572	109444	25562	45224	31853	29576	23194	36739	583755

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 yang diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan pengunjung di setiap bulan dan per tahun sangat signifikan, peneliti memfokuskan penelitian di pantai bali lestari dan dapat di lihat peningkatan yang sangat tinggi di Pantai Bali Lestari dibulan juli saat libur lebaran Pengunjung bisa mencapai 49,900 orang pada bulan tersebut.

4. Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur – unsur spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan.

Susunan Struktur Organisasi kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubbag perencanaan Keuangan dan Akuntabilitas
5. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
6. Kepala Bidang Pariwisata
7. Kepala Bidang Kebudayaan
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda

9. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
10. Kepala Seksi Tradisi Dan Kesenian
11. Kepala Seksi Destinasi Dan Industri
12. Kepala Seksi Cagar Budaya Dan Permuseuman
13. Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
14. Seksi Pemasaran Pariwisata
15. Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan Olahraga
16. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Jumlah sumber daya manusia dilingkungan kantor Disporaparbud Kabupaten Sedang Bedagai berjumlah 30 orang yang tersebar disemua unit organisasi.

Gambar 3.4 : *Struktur organisasi*



5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai

A. Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai

Tugas kantor Disporaparbud ialah membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Fungsi kantor Disporaparbud ialah :

1. Perumusan kebijakan dibidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
3. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungan tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan

B. Kepala Dinas

Tugas pokok kepala dinas ialah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan

Fungsi kepala dinas ialah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan
5. Pelayanan administratif

C. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris ialah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

Fungsi sekretaris ialah :

1. Penyelenggaraan tugas administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Dinas
2. Melaksanakan tugas Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan
3. Melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas diberhentikan sementara
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

D. Kepala Bidang Pariwisata

Tugas pokok kabid pariwisata adalah melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan di bidang pariwisata.

Fungsi kabid pariwisata :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata
2. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pariwisata
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pariwisata
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata

E. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok yaitu menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian
2. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan dilingkungan dinas
3. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di sub bagian umum dan kepegawaian

F. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas

Tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan pembendaharaan, pembukuan,

menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan dinas.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Akuntabilitas

1. Pengelolaan administrasi keuangan
2. Penyusunan rencana dan program kerja lingkungan dinas
3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang anggaran, rencana, monitoring dan evaluasi
4. Pengelolaan, penyusunan dan penyajian dan bagian bahan informasi

G. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tugas pokok yaitu melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dibidang kepemudaan dan olahraga

Fungsi Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Penyiapan rumus kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga
2. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang kepemudaan dan olahraga
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kepemudaan dan olahraga

H. Seksi Destinasi dan Industri Wisata

Tugas pokok yaitu menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di pengembangan destinasi dan industri wisata

Fungsi Seksi Destinasi dan Industri Wisata

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi dan industri wisata
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan destinasi dan industri wisata
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan destinasi dan industri wisata
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang destinasi dan industri wisata

I. Seksi Tradisi dan Kesenian

Tugas pokok yaitu menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang tradisi dan kesenian

Fungsi Bidang Tradisi dan Kesenian

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang tradisi dan kesenian
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tradisi dan kesenian
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang tradisi dan kesenian
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tradisi dan kesenian

J. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang sejarah dan keurbakalaan

Fungsi Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sejarah dan keurbakalaan
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah dan keurbakalaan
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang sejarah dan keurbakalaan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sejarah dan keurbakalaan

K. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Tugas pokok yaitu menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang cagar budaya dan permuseuman

Fungsi Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman yaitu

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang cagar budaya dan permuseuman
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang cagar budaya dan permuseuman
3. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang cagar budaya dan permuseuman

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cagar budaya dan permuseuman

L. Bidang Kebudayaan

Tugas pokok yaitu melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas disporaparbud

Fungsi Bidang Kebudayaan yaitu

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan
3. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebudayaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Objek Wisata Bahari Seperti Pantai Bali Lestari

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui observasi langsung ke objek wisata bahari pantai bali lestari, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata bahari dipantai bali lestari masih kurang baik dan maksimal, terlihat dari adanya tembok yang di bangun secara permanen di bibir pantai dan dibangun dengan alasan menahan abrasi, tetapi itu terkesan seperti reklamasi ada juga patung besar yang di bangun di bibir pantai, itu disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari terhadap peraturan daerah No 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai yang melarang pembangunan permanen di bibir pantai ini disebabkan oleh Dinas Pariwisata yang tidak melakukan sosialisasi rutin berkaitan dengan peraturan daerah no 9 tahun 2008 dan kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh Disporaparbud.

Keadaan lain pantai bali lestari seperti :

1. Bangunan

Bangunan yang terdapat di pantai bali lestari sudah cukup banyak dan lengkap terlihat dari adanya bangunan seperti: pondok – pondok peristirahatan, tempat ibadah, toilet, lestoran dan tempat parkir yang sangat luas

2. Wahana

Wahana di pantai bali lestari cukup beragam dan cocok sebagai salah satu tambahan untuk bermain seperti: Banana boot, zet sky, bola pantai dan lain – lain.

3. Spot foto

Pantai bali lestari selain menyajikan pemandangan pantai yang indah dan pasir pantai yang putih, pantai bali lestari juga memiliki spot foto yang beragam yang sudah disediakan oleh pengelola pantai sehingga pengunjung bisa bersantai sambil berfoto bersama keluarga.

Adapun hasil penelitian akan disajikan yang didapatkan dari hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung, data yang di peroleh berupa hasil wawancara dengan narasumber, yaitu : Kabid Pariwisata, Pj Kasih Destinasi dan Industri Pariwisata dan 2 orang masyarakat yang mengelola objek wisata bahari.

B. Pembahasan

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang di peroleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kabid Pariwisata, Pj Kasi Destinasi dan Industri Pariwisata, dan 2 masyarakat yang langsung mengelola objek wisata bahri di Pantai Bali Lestari.

1. Adanya penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang apaengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai.

Pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari tentunya memiliki pedoman yaitu Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 bertujuan untuk pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga mewujudkan moto pariwisata nasional yaitu SAPTAPESONA yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Pelaksanaan peraturan daerah terkadang terkendala oleh perubahan – perubahan pola pikir masyarakat, di tambah banyaknya masyarakat yang baru mengelola objek wisata bahari masih belum mengetahui berlakunya peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, itu disebabkan kurangnya sosialisasi, kerjasama dan pengenalan terhadap praturan daerah tentang pengelolaan objek wisata.

Sehingga kurangnya koordinasi antar unsur dinas dan masyarakat yang mengelola objek wisata bahari menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan daerah di kabupaten serdang bedagai, karna tanpa adanya koordinasi yang baik akan sangat sulit menjalankan peraturan daerah.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sampe Lumbantoruan S.Pd selaku Kabid Pariwisata, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 tentang pelaksanaan pegelolaan objek wisata bahari di serdang bedagai dinilai belum maksimal karena tidak semua masyakat yang mengelola objek wisata bahari mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari yang berlaku di kabupaten serdang bedagai dan sudah banyak pengelola objek wisata yang baru, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan objek wisata yang tidak terkelola sesuai ketentuan peraturan daerah. Beliau mengatakan

masyarakat harus lebih peka terhadap peraturan daerah yang berlaku di serdang bedagai.

Sedangkan menurut Bapak Ikhwan Hasian Siregar S.Sos sebagai Pj Kasi Destinasi dan Industri pariwisata, hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 acuan atau pedoman yang dijadikan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini diterapkan dengan baik maka pengelolaan objek wisata bahari di kabupaten serdang bedagai akan tertata dengan baik dan nyaman, karna tidak akan ada perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari peraturan daerah no 9 tahun 2009 yang dilakukan masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari karna adanya rasa takut terhadap hukuman dan sangsi yang berlaku di dalam peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya menurut Bapak Apriansya Putra selaku masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari, hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 peranan atau upaya dari dinas Disporaparbud belum maksimal dalam menjalankan peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari, haln ini dapat dilihat dari kurangnya kegiatan – kegiatan atau program – program yang dilakukan Disporaparbud dalam mengenalkan peraturan daerah no 9 tahun 2008 sehingga masih banyak masyarakat yang mengelola objek wisata bahari tidak mengetahui ada peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai yang berlaku di kabupaten serdang bedagai, terlebih lagi masyarakat pengelola objek wisata bahari yang baru. Jika tidak sering dilakukan sosialisasi maka peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari akan hialng dan tidak di jalankan lagi.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahsa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan

Sungai. Sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat. Begitu pula perlunya pedoman dan acuan yang baku untuk pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata Bahari. Agar mencapai tujuan yang dicanangkan, yaitu pengelolaan yang Baik dan Tertata.

2. Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari.

Program – program kebijakan pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari adalah wewenang Disporaparbud sepenuhnya, dan yang menjalankan penerapan dan pelaksanaannya adalah masyarakat langsung, pemerintah kabupaten memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk penerapan dan pelaksanaan dari program – program yang telah dibuat, karna masyarakat lah yang mengetahui potensi – potensi yang ada di tempat wisata bahari.

Menurut Bapak Sampe Lumbantoruan selaku Kabid Pariwisata, hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 program kerja dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai sudah pernah dilakukan, meskipun tidak rutin, paling tidak dalam setahun sekali pasti ada dilakukan, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi masyarakat yang mengelola objek wisata bahari tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan bagaimana pelaksanaannya. Kegiatan seperti itu biasanya dilakukan langsung ditempat – tempat wisata yang ada diserdang bedagai, akan tetapi menurut beliau anomi masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut tidak lah besar, hanya sebagian saja dari masyarakat pengelola objek wisata bahari yang dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan seperti ini pada hal ditujukan kepada

masyarakat yang baru mengelola objek wisata bahari, pemerintah kantor Disporaparbud juga tidak memaksa masyarakat untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut.

Kemudian menurut Bapak Apriansyah Putra selaku salah satu masyarakat yang mengelola objek wisata bahari yang ada di serdang bedagai, hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 pemerintah Dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan hanya sekali melakukan program – program atau kegiatan sosialisasi atau pelatihan – pelatihan terhadap masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari untuk menambah wawasan masyarakat yang mengelola tentang pengelolaan objek wisata bahari yang benar, menurut beliau mungkin Disporaparbut menilai masyarakat sudah mengetahui tentang bagaimana menerapkan dan menjalankan pengelolaan objek wisata bahari yang benar, seharusnya pegawai Disporaparbud juga melakukan kegiatan sosialisasi yang rutin tentang keberadaan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari ini dengan mendatangkan perwakilan dari dinas untuk menjelaskan dan menerangkan peraturan daerah tersebut, mungkin masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan daerah yang menangani tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program pengelolaan objek wisata bahari dikabupaten serdang bedagai, sangat dibutuhkan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat yang mengelola langsung objek

wisata bahari untuk sama – sama bekerja sama dalam menjalankan program pengelolaan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

3. Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan objek wisata memiliki prosedur kerja seperti rapat mingguan, dalam menyelesaikan masalah – masalah yang menyangkut pengelolaan dan masalah lainnya yang terjadi ditempat – tempat wisata bahari yang ada di kabupaten serdang bedagai.

Sebagaimana seperti yang disampaikan Bapak Sampe Lumbantoruan S.Pd sebagai Kabid Pariwisata, hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dalam penyelesaian masalah – masalah pengelolaan objek wisata bahari dengan menggunakan peraturan daerah, ada tahapan – tahapannya yang dilakukan mulai dari melihat masalahnya, melakukan musyawarah dan mediasi terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan dan memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan jika masalah tersebut sudah menyimpang jauh dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah tentang pengelolaan objek wisata bahari, seperti membangun bangunan permanen di bibir pantai dan yang lainnya ada hukuman atau sanksi yang di berikan terhadap pelanggar, seperti membayar denda.

Kemudian menurut Bapak Apriansyah Putra selaku masyarakat yang mengelola langsung salah satu objek wisata bahari yang ada di serdang bedagai, hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 perlu ada informasi yang lebih terhadap

prosedur pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari bagi masyarakat yang mengelola mulai dari kegiatan – kegiatan sosialisasi hingga pihak Dinas turun langsung untuk melakukan pengelolaan objek wisata bahari, sehingga masyarakat terbiasa dan secara otomatis melihat langsung bagaimana prosedur pengelolaan objek wisata bahari yang sesuai dengan peraturan daerah serdang bedagai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengelolaan objek wisata bahari, belum terlihat jelas pelaksanaannya, maka dipubutuhkan sosialisasi tentang prosedur pengelolaan objek wisata bahari, dan dapat dijalankan bersama sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai belum Terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai terlebih di Pantai Bali Lestari. Adapun katagorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yakni :

1. Adanya penyampaian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seradang Bedagai, dalam hal ini pemerintah Disporaparbud menjalankan pengelolaan objek wisata bahari yang berpedoman pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 untuk membuat keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak masyarakat yang melanggar aturan pengelolaan objek wisata bahari.
2. Adanya perilaku sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan program – program kebijakan yang dijalankan yaitu pengelolaan objek wisata bahari, masyarakat yang mengelola objek wisata bahari sudah menjalankan program – program pengelolaan objek wisata bahari dengan baik. Namun peran Disporaparbud masih

kurang dalam mensosialisasikan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai bagi masyarakat yang mengelola objek wisata bahari guna menambah wawasan dan informasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata bahari.

3. Adanya prosedur pengelolaan yang baik dari pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kelestarian pantai dan keindahan pantai sehingga menambah jumlah pengunjung di daerah wisata, seperti adanya tahapan – tahapan dalam penyelesaian masalah pengelolaan objek wisata bahari yang terjadi ditempat – tempat objek wisata pantai. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya hambatan – hambatan karena masih banyak masyarakat yang mengelola objek wisata bahari yang tidak mengetahui bagaimana prosedur kerja yang dilakukan Disporaparbud dalam pelaksanaan Perda no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata pesisir pantai dan sungai.

2. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Disporaparbud diharapkan dapat menjalankan Perda no 9 tahun 2008 tentang pengelolaan objek wisata bahari, dan juga lebih sering

melakukan kunjungan kerja ke tempat – tempat objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Diharapkan agar kedepannya para pelaku yang melanggar ketentuan perda no 9 tahun 2008 mendapatkan hukuman sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
3. Kepada seluruh pemerintah Disporaparbud dapat bekerja sama dengan masyarakat yang mengelola langsung objek wisata bahari dan melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan tugas – tugas dilapangan maupun dikantor dinas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006, *Politik Dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Agustino, Leo. 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Agung. Jakarta, Poerwadarminta, W.J.S 1990 : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta, Balai Pustaka.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2012, *Metodologi penelitian Kualitatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Handayani, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta; Cv Haji Masagung
- Islamy, Irfan. 2003 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kencana Syafie Inu 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Meleong, Lexy J 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosakarya
- Pitana, Frof Dr, I Gde Dan I Ketut Surya Diarta 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Nainggolan, Drs Radjoki 2016, *Kepariwisata*, medan
- Syafie, Inu Kencana. 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta
- Tachjan, Dr H, Msi. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta.

Thoha, Miftah 2008 : *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*, Jakarta, Penerbit, Praneda Media Grup

Wahab, Abdul Solichin, 2014 : *Analisi Kebijakan*, Bumi Aksara , Jakarta.

Winarno, Budi, 2001,*Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta. .

Wahab, Abdul Solichin, 2005: *Analisi Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab, Abdul Solichin, 2014 : *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta

B. Perundang-undangan

-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata

-Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Objek Wisata

Pesisir Pantai Dan Sungai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Khusairi

Umur : 21 Tahun

Tempat/Tanggal Lahir : Arapayung, 15 September 1996

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Tempat Tinggal : Desa Lebuk Dendang Dusun 2 Kecamatan Perbaungan

Nama Orang Tua

Ayah : Zullamri

Ibu : Salbiah

PENDIDIKAN

1. Tamat SD Negeri 107424 Suka Beras Tahun 2008, Berijazah
2. Tamat SMP Negeri 3 Perbaungan Tahun 2011, Berijazah
3. Tamat SMK Negri 1 Pantai Cermin Tahun 2014, Berijazah
4. Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2017

Yang Menyatakan,

MUHAMMAD KHUSAIRI